



DEWANPERS

Dewan Pers Rencana Tingkatkan Profesionalisme Wartawan

Dewan Pers pada tahun 2021 akan melakukan peningkatan profesionalisme wartawan melalui pelatihan dan fasilitas uji kompetensi. Untuk kegiatan yang diadakan di 34 provinsi ini ditargetkan 1700 wartawan akan disertifikasi. Selain fasilitas uji kompetensi Dewan Pers juga akan melakukan pendataan terhadap 350 perusahaan pers.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun yang mewakili Ketua Dewan Pers Mohammad NUH di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 1 DPR di Jakarta, hari Senin 1 Februari 2021. Hadir mewakili Dewan Pers langsung di DPR adalah Agus Sudibyo, Ahmad Djauhar, Agung Dharmajaya dan Hassanein Rais. Sedangkan Asep Setiawan hadir secara virtual. Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Haris Almasyhari.



Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun memberikan pemaparan program Dewan Pers di Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPR



DEWANPERS

Dijelaskan bahwa fasilitas uji kompetensi bagi wartawan tahun 2021 merupakan kelanjutan dari program 2020 yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya Pandemi Covid-19. Tahun 2020 yang lalu dijadwalkan pelatihan dan fasilitas uji kompetensi di 20 provinsi dengan target 480 peserta namun hanya dapat dilakukan di satu provinsi dengan peserta 24 wartawan.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun memaparkan pula bahwa pelaksanaan verifikasi faktual yaitu mendatangi lokasi perusahaan pers di berbagai provinsi di Indonesia yang semula tahun 2020 direncanakan 250 diubah menjadi 114. Namun realisasinya ternyata melebihi target yaitu 145 perusahaan yang telah dilakukan verifikasi faktual.

Data Program Verifikasi Perusahaan Pers Periode Januari-Desember 2020

Jenis Media	Terverifikasi Administratif & Faktual	Terverifikasi Administratif	Belum Terverifikasi	Media Mendata
Cetak	42	57	573	672
Radio	0	3	76	79
Televisi	3	3	157	163
Siber	100	201	3154	3455
Jumlah	145	264	3960	4369

Rencana Anggaran

Hendry Ch Bangun menyatakan bahwa anggaran Dewan Pers tahun 2021 adalah 35.614.034.000 dialokasikan untuk menunjang program komunikasi publik yang merupakan Tugas dan Fungsi Dewan Pers serta program dukungan manajemen untuk unsur kesekretariatan pelayanan kantor yang terdiri atas :

- Layanan pengembangan pers dan kerjasama Pers sebanyak Rp 5.319.842.000
- Layanan pengaduan masyarakat sebesar Rp 2.204.924.000



DEWANPERS

- Indeks Kemerdekaan Pers yakni survei di 34 provinsi sebesar 5.022.871.000
- Peningkatan kompetensi wartawan ini merupakan perbaikan atas target yang gagal dilakukan tahun lalu yaitu di 34 provinsi dengan target 1700 wartawan bersertifikat dengan anggaran Rp 10.072.174.000
 - Kemudian pendaftaran dan verifikasi perusahaan pers dengan target verifikasi faktual untuk 350 perusahaan pers dengan anggaran Rp. 1.003.364.000
 - Sementara untuk program dukungan manajemen layanan kesekretariatan dan perkantoran mencapai Rp 11.456.859.000
 - Serta layanan sarana dan prasarana sebesar Rp 534.000.000.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Survei Indeks Kemerdekaan Pers yang tahun mencapai skor diatas 75, 27 yang artinya pers nasional dalam kondisi cukup bebas. Tahun ini diharapkan skor IKP naik menjadi 75, 50. Sedangkan program lain yang juga penting adalah melayani pengaduan masyarakat yang diharapkan dapat menyelesaikan 85 persen kasus selama setahun. Sebagai informasi sekitar 500 pengaduan masuk ke Dewan Pers sehingga hampir setiap minggu terdapat sidang penyelesaian pengaduan etik dengan panduan Kode Etik Jurnalistik.

Perlindungan Pers

Dewan Pers juga peduli dalam upaya perlindungan tugas pers dan dalam meningkatkan kualitas perusahaan pers melalui revisi peraturan dan program perusahaan pers. Kemudian Dewan Pers juga peduli terhadap pengaruh disrupsi dan teknologi informasi media sosial layanan platform berbasis internet terhadap pers dan pengaruh pandemic kepada wartawan dan industri pers.

Hendry Ch Bangun menjelaskan mengenai revisi ini dimaksudkan sebagai upaya agar dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian maka nanti akan dapat hidup begitu pula dengan wartawannya tetap mendapatkan kesejahteraan yang cukup.



DEWANPERS

Dalam rangka perlindungan pers ini, Wakil Ketua Dewan Pers menjelaskan bahwa hingga saat ini sedang diupayakan dan dikoordinasikan dengan pemerintah adalah pertama mengenai penghapusan pajak impor kertas untuk media cetak, penghapusan pajak untuk produk media cetak, kemudian pemerintah menanggung biaya listrik dan perusahaan pers, kemudian pemerintah menanggihkan kewajiban pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk perusahaan pers selama satu tahun. Dalam kesempatan ini, Dewan Pers berharap DPR dapat mendukung perlindungan terhadap eksistensi pers karena dampak pandemi Covid-19 ini.

Dalam Raker Komisi 1 DPR ini lembaga lain yang hadir dan memaparkan kinerja dan program 2021 adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP).***